



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXIX : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025





PERUBAHAN RENCANA KERJA



2025



**Pemerintah Kota Batam
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Jalan Raja Haji No. 03 Telp. (0778) 323429 Fax. (0778) 327794

Email : Dinas_KP2_KotaBatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 suatu dokumen perubahan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan suatu dokumen perencanaan program perubahan tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan di Kota Batam.

Perubahan Rencana Kerja ini menjadi acuan segenap satuan kerja dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan. Tugas membangun sektor Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kelembagaan dan Penyuluhan ke depan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, Juli 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Batam



Mardanis, AMP, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680714 198811 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting	39
4.2 Kaidah Pelaksanaan	39
4.3 Rencana Tindak Lanjut	39

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Realisasi Kinerja dan Keuangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 s/d Triwulan I.....	
	6
.....	
Tabel	2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18
Tabel	3.1 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7/000.7.2/IV/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- 2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - B. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - C. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - D. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - E. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - F. Program Penyuluhan Pertanian
 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - G. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 1. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - H. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
Adapun Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang rencana tidak dikareanakan pengukuran baru pada TW I
- 2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 (Percentase)	22,55 (Percentase)	23%		
2	09	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 (Percentase)	23,4 (Percentase)	23%	
2	09	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51.00 (Orang/bulan)	51.00 (Orang/bulan)	100%
2	09	01	2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 (Dokumen)	3 (Dokumen)	25%
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 (Percentase)	20,99 (Percentase)	21%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
2	09	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 (Paket)	1.00 (Paket)	100%
2	09	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 (Paket)	3.00 (Paket)	75%
2	09	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 (Paket)	0 (Paket)	0%
2	09	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2.00 (Dokumen)	2.00 (Dokumen)	100%
2	09	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 (Laporan)	3.00 (Laporan)	25%
2	09	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 (Percentase)	0.65 (Percentase)	1%

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1							2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	09	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28.00 (Unit)	0.00 (Unit)	0%	
2	09	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88.00 (Unit)	3.00 (Unit)	3%	
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 (Percentase)	34.73 (Percentase)	35%	
2	09	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 (Laporan)	3.00 (Laporan)	25%	
2	09	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 (Laporan)	4.00 (Laporan)	33%	
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 (Percentase)	9.25 (Percentase)	9%	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
2	09	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 (Unit)	1.00 (Unit)	100%
2	09	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16.00 (Unit)	1.00 (Unit)	6%
2	09	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82.00 (Unit)	19.00 (Unit)	23%
2	09	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 (Unit)	0.00 (Unit)	0%
						Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	1. Ketersediaan Pangan Utama	152.9 (kg / kapita / tahun)	0 (kg / kapita / tahun)	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	2609 (kkal/kapita/hari)	0 (kkal/kapita/hari)	0%		
2	09	03	2	01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	152.8 (Kg/Kapita/Tahun)	0 (Kg/Kapita/Tahun)	0%	
2	09	03	2	01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	0%	
2	09	03	2	02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlh cad pangan pemda per 100 ton x 100%)	45%	0%	0%	
2	09	03	2	02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45.00 (Ton)	0 (Ton)	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	12 (Kecamatan)	0 (Kecamatan)	0%
2	09	01	2	04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.00 (Laporan)	0 (Laporan)	0%
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	65.63 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
2	09	04	2	01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	100 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
2	09	04	2	01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 (Dokumen)	0 (Dokumen)	0%
2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)	3.13 (Percentase)	0 (Percentase)	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
2	09	04	2	02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 (Dokumen)	0 (Dokumen)	0%
						Terjaganya Keanekaragaman, Ketersediaan dan keamanan pangan	2. Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi (PSAT)	89 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	89 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)	89 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
2	09	05	2	01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60.00 (Dokumen)	0 (Dokumen)	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan	1. Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	4 (Percentase)	0 (Percentase)	0%				
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	4 (Percentase)	0 (Percentase)	0%		
					Jumlah produksi ternak sapi	110 (ekor)	0 (ekor)	0%		
3	27	02	2	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	36345 (ton)	8.144 (ton)	22%	
3	27	02	2	01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.00 (Laporan)	0 (Laporan)	0%
3	27	02	2	05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	20 (ekor)	7 (Ekor)	35%
3	27	02	2	05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1.00 (Laporan)	0 (Laporan)	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 (Percentase)	0 (Percentase)	0%
3	27	07	2	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	90 (Percentase)	25 (Percentase)	28%
3	27	07	2	01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 (Unit)	0 (Unit)	0%
3	27	07	2	01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12.00 (Unit)	12.00 (Unit)	100%
3	27	07	2	01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	7 (Orang)	0 (Orang)	0%
						Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan	2. Persentase peningkatan produksi ternak sapi	22 (Percentase)	0 (Percentase)	0%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	282 (ton/tahun)	36.346 (ton/tahun)	13%
3	27	03	2	02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH dan RPU	2 (Unit)	0 (Unit)	0%
3	27	03	2	02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2.00 (Unit)	0 (Unit)	0%
						Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Strategis dan Penyakit Zoonosis	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	95 (Percentase)	25 (Percentase)	26%
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	95 (Percentase)	25 (Percentase)	26%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
3	27	04	2	01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	95 (Percentase)	25 (Percentase)	26%
3	27	04	2	01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6.00 (Wilayah)	0 (Wilayah)	0%
3	27	04	2	03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan/produk asal hewan di UPTD Puskeswan	1275 (Kali)	615 (Kali)	48%
3	27	04	2	03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12.00 (Laporan)	3 (Laporan)	25%
3	27	04	2	03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12.00 (Laporan)	3 (Laporan)	25%
3	27	04	2	04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Unit Usaha Produk Asal Hewan yang didampingi	62 (Percentase)	0 (Percentase)	0%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)				
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100				
3	27	04	2	04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15.00 (Unit Usaha)	0 (Unit Usaha)	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk pada Tahun 2016 sesuai dengan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 10 Tahun 2016 Pembentukan dan susunan Perangakat Daerah sedangkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam tertuang dalam Peraturan Walikota Batam Nomor : 33 Tahun 2024.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.2	Scor		Scor	
2	Peningkatan Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	89.0	%		%	Belum Bisa diukur
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg /kapita / tahun)	152.8	(kg /kapita / tahun)		(kg /kapita / tahun)	Belum Bisa diukur
4	Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	4.0	%		%	Belum Bisa diukur
5	Persentase peningkatan produksi ternak sapi	22	%		%	Belum Bisa diukur
6	Persentase hewan yang sehat dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (persentase hasil lab negative ditambah persentase lokus yang terealisasi dibagi dua)	95	%		%	Belum Bisa diukur

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi di Indonesia juga terjadi di Kota Batam, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan. Isu-isu strategis tersebut antara lain laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, legalitas lahan pertanian, regulasi/kelembagaan, terbatasnya infrastuktur pertanian serta pola pangan penduduk yang tergantung pada beras. Tidak sebandingnya hasil produksi pertanian dan peternakan dengan jumlah penduduk Kota Batam sehingga diperlukan peningkatan hasil pertanian dan peternakan dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada (Intensifikasi Pertanian) dan meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan peternakan yang sebelumnya di manfaatkan sebagai lahan pertanian (Ekstensifikasi Pertanian).

Berikut adalah beberapa isu strategis terkait ketahanan pangan dan pertanian.

1. Diversifikasi Pangan
upaya untuk memperbanyak jenis makanan yang dikonsumsi, tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras. Tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan gizi, mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.
2. Kualitas dan Keamanan Pangan
PSAT yang aman memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit.
3. Urban Farming
Praktik bercocok tanam di daerah perkotaan, memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan, atap gedung, atau bahkan dalam ruangan
4. Keterbatasan Lahan pertanian dan Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, seperti perumahan, industri, atau fasilitas mengurangi ketersediaan lahan untuk produksi pertanian dan berdampak negatif pada ketahanan pangan, mata pencaharian petani, dan lingkungan.
5. Kesehatan Hewan
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadi ancaman serius bagi peternakan, terutama sapi sehingga sampai saat ini pada tahun 2025 belum bisa pengadaan sapi bantuan untuk masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 12.581.099.146,00 pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 15.672.919.984,00 ada penambahan sebesar Rp. 317.916.775,00. Indikator Nilai SAKIP PD target 6.10%
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 10.206.585.524,00 dengan pagu APBD Rp. 10.940.090.600,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 13.359.835.224,00 ada penambahan sebesar Rp. 3.153.249.700,00. Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan dengan target 100%
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 10.206.585.524 dengan pagu APBD Rp. 10.887.810.600,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 13.307.555.224,00 ada penambahan sebesar Rp. 3.100.969.700,00. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 51 Orang.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp. 52.280.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 52.280.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 52.280.000,00. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 51 Orang.
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 257.632.463,00 dengan pagu APBD Rp. 219.268.400,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 103.497.400,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 154.135.063,00. Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran dengan target 100%.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 8.878.000,00 dengan pagu APBD Rp. 8.878.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 6.328.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 2.550.000,00. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 107.622.000,00 dengan pagu APBD Rp. 54.115.400,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 45.986.400,00 ada

Pengurangan sebesar Rp. 61.635.600,00. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 4 Paket

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 20.664.000,00 dengan pagu APBD Rp. 20.552.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 2.272.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 18.392.000,00 Jumlah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan target 1 Paket

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 3.866.463,00 dengan pagu APBD Rp. 3.600.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 1.950.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 1.916.463,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan target 2 Dokumen.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 116.602.000,00 dengan pagu APBD Rp. 132.123.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 46.961.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 69.641.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 12 Laporan.

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 574.387.079,00 dengan pagu APBD Rp. 751.492.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 912.899.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 338.511.921,00 Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan target 100 %

a. Pengadaan Mebel

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp. 95.037.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 256.444.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 256.444.000,00. Indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan target 62 Unit.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 574.387.079,00 dengan pagu APBD Rp. 656.455.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 656.455.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 82.067.921,00. Indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan target 88 Unit.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 1.137.604.080,00 dengan pagu APBD Rp. 919.930.560,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 858.506.360,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 279.097.720,00 Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan target 100%.

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 199.560.000,00 dengan pagu APBD Rp. 199.560.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 199.560.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 0. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 12 Dokumen.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 938.044.080,00 dengan pagu APBD Rp. 720.370.560,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 658.946.360,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 279.097.720,00. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 12 Dokumen.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 404.890.000,00 dengan pagu APBD Rp. 338.780.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp. 438.182.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 33.292.000,00. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik target 100%

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 44.040.000,00 dengan pagu APBD Rp. 40.880.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 40.880.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 3.160.000,00. Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya target 1 Unit

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 121.220.000,00 dengan pagu APBD Rp. 112.100.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 112.100.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 9.120.000,00. Indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 1 Unit.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 21.230.000,00 dengan pagu APBD Rp 56.900.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 42.650.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 21.420.000,00. Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara target 82 Unit.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 218.400.000,00 dengan pagu APBD Rp 128.900.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 242.552.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 24.152.000,00. Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas target 2 Unit.

B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 681.978.600,00 dengan pagu APBD Rp 753.782.600,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 628.895.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 895.755.987,00. Indikator Ketersediaan Energi target 2,609.00 kkal per kapita per hari.

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dana yang dialokasikan pada Renja 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp 0 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 31.952.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 31.952.000,00. Indikator Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun) target 153 Kg/k apita/tahun

a. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp 0 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 83.606.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 83.606.000,00. Indikator Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) target 1 Dokumen.

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 170.000.000,00 dengan pagu APBD Rp 191.842.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 191.842.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 21.842.000,00. Indikator Persentase penguatan cadangan pangan Pemda target 86%

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 170.000.000,00 dengan pagu APBD Rp 191.842.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 191.842.000,00 ada Penambahan sebesar Rp. 21.842.000,00. Indikator Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota target 45 Ton

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 511.978.600,00 dengan pagu APBD Rp 561.940.600,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 353.447.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 158.531.600,00. Indikator Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School target 12 Kecamatan.

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 511.978.600,00 dengan pagu APBD Rp 561.940.600,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 353.447.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 158.531.600,00. Indikator Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal target 1 Laporan.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 34.270.000,00 dengan pagu APBD Rp 25.570.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 78.193.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 215.298.859,00. Indikator Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan mencapai target 3.12%.

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp 0 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 67.592.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 67.592.000,00. Indikator Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi target 100%.

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Dana yang dialokasikan pada Renja 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp 0 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 67.592.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 67.592.000,00. Indikator Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan mencapai target 1 Dokumen.

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 34.270.000,00 dengan pagu APBD Rp 25.570.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 10.601.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 23.669.000,00. Indikator Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting target 1.5 Ton

- a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2025 Rp. 34.270.000,00 dengan pagu APBD Rp 25.570.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 10.601.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 23.669.000,00. Indikator Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mencapai target 1 Dokumen.

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dana yang dialokasikan pada Renja 2025 Rp. 57.107.200,00 dengan pagu APBD Rp 48.751.800,00 dan pada pagu Renja Perubahan 2025 Rp 48.751.800,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 46.190.041,00. Indikator Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 100%.

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 57.107.200,00 dengan pagu APBD Rp 48.751.800,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 48.751.800,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 8.355.400,00. Indikator Jumlah sampel PSAT yang diuji mencapai target 12 Sampel%

- a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 57.107.200,00 dengan pagu APBD Rp 48.751.800,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 48.751.800,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 8.355.400,00. Indikator Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota target 80 Dokumen.

E. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 4.058.996.863,00 dengan pagu APBD Rp 5.459.096.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 6.067.446.900,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 2.952.669.011,00. Indikator Peningkatan Produksi Pertanian target 175.49 Ton dan Peningkatan Komuditas Peternakan target 3 Ekor

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 3.367.500.863,00 dengan pagu APBD Rp 5.404.166.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan 2025 Rp 6.039.161.900,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 2.671.661.037,00. Indikator Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura) target 3059.84 Ha.

- a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 3.367.500.863,00 dengan pagu APBD Rp 5.404.166.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan 2025 Rp 6.039.161.900,00 ada

Pengurangan sebesar Rp. 2.671.661.037,00. Indikator Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian target 1 Dokumen.

2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 691.496.000,00 dengan pagu APBD Rp 54.930.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 28.285.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 663.211.000,00. Indikator Jumlah Produksi hewan ternak sapi target 20 Ekor.

- a. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 691.496.000,00 dengan pagu APBD Rp 54.930.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 28.285.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 663.211.000,00. Indikator Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia target 1 Laporan.

F. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 1.750.933.400,00 dengan pagu APBD Rp 687.489.400,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 648.496.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 1.102.437.400,00. Indikator Persentase Peningkatan Karkas Hewan Ternak Potong dari RPH Target 1 %.

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 3.367.500.863,00 dengan pagu APBD Rp 5.404.166.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan 2025 Rp 6.039.161.900,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 2.671.661.037,00. Indikator Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun) 110.7 Ton.

- a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 1.750.933.400,00 dengan pagu APBD Rp 687.489.400,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 648.496.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 1.102.437.400,00. Indikator Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta Beroperasi target 2 Unit.

G. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 1.192.448.668,00 dengan pagu APBD Rp 1.086.311.742,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 1.028.031.742,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 501.348.256,00. Indikator Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Target 100 %.

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 124.204.937,00 dengan pagu APBD Rp 124.204.937,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 111.336.937,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 12.868.000,00. Indikator Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji Taget 100 %

- a. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 124.204.937,00 dengan pagu APBD Rp 124.204.937,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 111.336.937,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 12.868.000,00. Indikator Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Target 6 Wilayah
2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 62.443.358,00 dengan pagu APBD Rp 50.385.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 24.954.500,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 37.488.858,00 . Indikator Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi Target 32. 13%
 - a. Veteriner Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 62.443.358,00 dengan pagu APBD Rp 50.385.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 24.954.500,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 37.488.858,00 . Indikator Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi dengan persentase Target 32.13 %.
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 1.005.800.373,00 dengan pagu APBD Rp 911.721.805,00 dan pada pagu Renja Perubahan 2025 Rp 891.740.305,00 ada Pengurangan sebesar Rp. 114.060.068,00. Indikator Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan target 1275 Kali Layanan per tahun.

H. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 600.002.000,00 dengan pagu APBD Rp 615.600.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 781.820.000,00 ada Penambahan sebesar Rp 181.818.000,00. Target persentase (%) yang dicapai dalam program penyuluhan pertanian ini adalah 90 % per tahun.

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 600.002.000,00 dengan pagu APBD Rp 615.600.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 781.820.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp 181.818.000,00. Indikator Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan adalah 90 persen per tahun.
 - a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 600.002.000,00 dengan pagu APBD Rp 615.600.000,00 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 749.900.000,00 ada Penambahan sebesar Rp 149.898.000,00. Indikator Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasn adalah 12 Unit.
 - b. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2025 Rp. 0 dengan pagu APBD Rp 0 dan pada pagu Renja Perubahan Tahun 2025 Rp 31.920.000,00 ada Pengurangan sebesar Rp 31.920.000,00 Indikator Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya adalah 7 Orang.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target
dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025. tahun berjalan 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					20.956.835.877	24.954.554.426	3.997.718.549	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.354.454.946	16.428.759.784,00	3.074.304.838	
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					13.354.454.946	16.428.759.784	3.074.304.838	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP PD dan Indeks Pelayanan Keskretariatan Peragkat Daerah	100 %	6.10 Nilai dan 78	12.581.099.146	15.672.919.984	3.091.820.838	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuh	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	10.206.585.524	13.359.835.224	3.153.249.700	
2.09.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	72 Orang/bulan	10.206.585.524	13.307.555.224	3.100.969.700	
2.09.01.2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	0	52.280.000	52.280.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	257.632.463	103.497.400	-154.135.063	
2.09.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.878.000	6.328.000	-2.550.000	
2.09.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	107.622.000	45.986.400	-61.635.600	
2.09.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.664.000	2.272.000	-18.392.000	
2.09.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	3.866.463	1.950.000	-1.916.463	
2.09.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	116.602.000	46.961.000	-69.641.000	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	574.387.079	912.899.000	338.511.921	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	28 Unit	0,00	256.444.000	256.444.000	
2.09.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	88 Unit	574.387.079	656.455.000	82.067.921	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.137.604.080	858.506.360	-279.097.720	
2.09.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	199.560.000	199.560.000	0	
2.09.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	938.044.080	658.946.360	-279.097.720	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	404.890.000	438.182.000	33.292.000	
2.09.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.040.000	40.880.000	-3.160.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	16 Unit	121.220.000	112.100.000	-9.120.000	
2.09.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	82 Unit	21.230.000	42.650.000	21.420.000	
2.09.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	218.400.000	242.552.000	24.152.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	2,609.00 kkal per kapita per hari	2,609.00 kkal per kapita per hari	681.978.600	628.895.000	-53.083.600	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	Jumlah Pangan utama Masyarakat (beras) (Kg/kapita/tahun)	152.8 Kg/kapita/tahun	153 Kg/kapita/tahun	0	83.606.000,00	83.606.000	
2.09.03.2.01.001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 Dokumen	1 Dokumen	0	83.606.000,00	83.606.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda (jumlah cadangan pangan pemda per 100 ton x 100%)	Persentase penguatan cadangan pangan Pemda	45%	86 %	170.000.000	191.842.000,00	21.842.000	
2.09.03.2.02.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Ton	9,5 Ton	170.000.000	191.842.000,00	21.842.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan peserta yang mengikuti LCM dan Demo Masak B2SA (kecamatan)	Cakupan peserta yang mengikuti LCM, Demo Masak B2SA dan B2SA Goes to School	12 Kecamatan	12 Kecamatan	511.978.600	353.447.000	-158.531.600	
2.09.03.2.04.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	511.978.600	353.447.000	-158.531.600	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah aman pangan	Persentase Daerah Rentan/Rawan Pangan	65.63 %	3.12 %	34.270.000	78.193.000	43.923.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase dokumen kerawanan pangan yang disusun	Jumlah kelurahan rentan pangan yang diidentifikasi	100 %	2 Kelurahan	0	67.592.000	67.592.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.04.2.01.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	0 Dokumen	1 Dokumen	0	67.592.000	67.592.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase wilayah rentan pangan yang ditangani (jumlah kelurahan rentan pangan/jumlah kelurahan x 100%)	Jumlah penyaluran bantuan CPD terhadap kelurahan rentan pangan, terdampak bencana, stunting	3.13 %	1.5 Ton	34.270.000	10.601.000	-23.669.000	
2.09.04.2.02.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	34.270.000	10.601.000	-23.669.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	89 %	100 %	57.107.200	48.751.800	-8.355.400	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel PSAT yang ditindaklanjuti ke Lab (Jumlah sampel yang diuji ke Lab/Jumlah sampel yang diuji x 100%)	Jumlah sampel PSAT yang diuji	46.67 %	25 Sampel	57.107.200	48.751.800	-8.355.400	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.09.05.2.01.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60 Dokumen	57.107.200	48.751.800	-8.355.400	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.845.647.158	6.985.558.337	2.139.911.179	
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4.845.647.158	6.985.558.337	2.139.911.179	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi ternak sapi Persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Peningkatan Produksi Pertanian dan Peningkatan Komoditas Peternakan	20 4 Ekor %	175.49 Ton dan 1 Ekor	4.058.996.863	6.067.446.900	2.008.450.037	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	Luas Tanam pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	36345 Ton	3059.84 Ha	3.367.500.863	6.039.161.900	2.671.661.037	
3.27.02.2.01.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	3.367.500.863	6.039.161.900	2.671.661.037	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi hewan ternak sapi (ekor)	Jumlah Produksi hewan ternak sapi	20 Ekor	20 Ekor	691.496.000	28.285.000	-663.211.000	
3.27.02.2.05.000	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan	691.496.000	28.285.000	-663.211.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	95 %	90 %	186.648.295	136.291.437	-50.356.858	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji	95 %	100 %	124.204.937,00	111.336.937	-12.868.000	
3.27.04.2.01.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	6 Wilayah	6 Wilayah	124.204.937,00	111.336.937	-12.868.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	Persentase jumlah unit usaha produk asal hewan yang didampingi	62 %	32.13 %	62.443.358	24.954.500	-37.488.858	
3.27.04.2.04.000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	15 Unit Usaha	89 Unit Usaha	62.443.358	24.954.500	-37.488.858	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	10 %	10 %	600.002.000	781.820.000	181.818.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	Persentase Kelompok Tani yang dibina/dikembangkan	90 %	90 %	600.002.000	781.820.000	181.818.000	
3.27.07.2.01.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit				
3.27.07.2.01.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Unit	240 Unit	600.002.000	749.900.000	149.898.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
3.27.07.2.01.000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian	Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	7 Orang	0	31.920.000	31.920.000	
	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS	UPTD RUMAH POTONG HEWAN/RUMAH POTONG UNGGAS					1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	Persentase Peningkatan Karkas Hewan Ternak Potong dari RPH	282 ton pertahun	1 %	1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah RPH yang dipelihara	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (Ton per tahun)	2 Unit	110.7 Ton	1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
3.27.03.2.02.001	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit	1.750.933.400	648.496.000	-1.102.437.400	
	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN					1.005.800.373	891.740.305	-114.060.068	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					1.005.800.373	891.740.305	-114.060.068	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.005.800.373	891.740.305	-114.060.068	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan lokus atau lokasi surveilance hewan dan produk asal hewan (%)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis	95 %	90 %	1.005.800.373	891.740.305	-114.060.068	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel keswan dan kesmavet yang diuji (jumlah sampel yang diuji / jumlah hewan dan produk asal hewan)	Jumlah frekuensi layanan kesehatan hewan melalui pemeriksaan kesehatan hewan dan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan / produk asal hewan di UPTD. Puskeswan	1275 Kali	1275 layanan	1.005.800.373	891.740.305	-114.060.068	
3.27.04.2.03.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	12 Laporan	355.840.273	355.840.105	-168	
3.27.04.2.03.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	649.960.100	535.900.200	-114.059.900	
J U M L A H							20.956.835.877	24.954.554.426	3.997.718.549	

BAB IV **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Ketahanan dan Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target - target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

